



SUMBER BERITA

X	RAKYAT BENGKULU	MEDIA INDONESIA
	BENGKULU EKSPRES	KOMPAS
	RADAR BENGKULU

KATEGORI BERITA UNTUK BPK

POSITIF NETRAL BAHAN PEMERIKSAAN PERHATIAN KHUSUS

Benang Kusut Aset

LAPORAN KHUSUS PALING menonjol persoalan aset yang setiap tahun selalu menjadi temuan BPK. Penyebabnya sangat kompleks. Mulai dari pencatatan tunggah titih, penggunaan tidak sesuai dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), sampai sering kali tidak bisa dibuktikan bentuk fisik saat pemeriksaan BPK RI.

Data tercatat di Bidang Aset BPKD Kabupaten Seluma kendaraan roda dua ada 959 unit berhasil dicatat di Kartu Inventaris Barang (KIB). Kemudian kendaraan roda empat atau mobil tercatat di KIB 426 unit. Namun Bidang Aset tidak bisa merincikan berapa jumlah masih beroperasi dan yang tidak beroperasi. Karena tidak sedikit rusak berat. Meskipun sejumlah kendaraan telah dilakukan pengumpulan atau dikandangkan di BPKD.

Sambutan dari halaman 1

"Pencatannya cukup lengkap jika dalam aset data, sering tidak tercatat di SIAKDA. Kalau saat pemeriksaan BPK misalnya kendaraan tidak dihidari, jika pada saat itu kendaraan tidak bisa dihidari maka akan menjadi catatan. Maka tugas kita mengidentifikasi tidak tersebut" kata Kepala Bidang Pengelola Keuangan Daerah (BKPD) Merah Halim, SP, MP, M.Si, MA dalam Rapat Bidang Aset Erwin Albedi, ST.

Is menjelaskan, kemudian yang masih menjadi persoalan adalah pencatatan aset tunggah titih seperti di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) kendaraan tidak sesuai dengan pencatatan asli. Kendaraan harusnya digambarkan oleh OPD A sebagai jenis di OPD B. Selain data tercatat di OPD, namun di Bidang Aset juga tercatat. Menjadi tugas Bidang Aset untuk melakukan pendataan dan pencatatan.

"Jadi kita untuk meneliti apakah data seperti itu tidak terdapat nomor-rangka dan nomor mesin yang sama di daerah terangnya."

Is mengemukakan, jika catatan dari BPK soal aset cukup banyak seperti-penelusuran jalan Irigasi dan Irigasi (II). Pihaknya harus memantapkan dimana lokasi, panjang dan lainnya. Ini masuk kategori Konstruksi Dalam Angkutan (KID). Seperti bidang aset pengantar, sudah selesai, 100 persen kepastian dilakukan pencatatan Rp 10, tidak terdapat pencatatan kerangka tidak 100 persen. Sehingga menjadi catatan BPK yang harus dibuktikan bahwa pengoperan sudah 100 persen dengan dokumentasi bahwa di mana, panjang dan lainnya.

"KID ini harus bisa dibuktikan ke BPK melalui cek ke lapangan dan ceknya juga pelaksanaan dokumen. Tetapi sudah tidak benar, masih melakukan penelusuran aset kendaraan lainnya tersebut di desa-desa, kendaraan dan pada mesin akan dibuktikan. Meskipun sudah rusak berat. Karena catatan BPK harus dibuktikan fisik kendaraan."

Aset kendaraan yang dari pihak Kabupaten Bengkulu Selatan rata-rata sudah rusak berat masih tercatat di Pembak Seluma dan menjadi beban pajak. Sementara kendaraan rusak tidak digunakan lagi," ujarnya.

Penataan aset kendaraan ini dilakukan oleh LHP BPK awal tahun 2021 atau hampir satu tahun dilakukan. Tahap pertama adalah Bidang Aset lakukan pada penataan kendaraan roda dua dan telah selesai dilakukan. Saat ini penataan roda empat atau mobil yang masih berjalan.

"Kalau masalah aset adalah persoalan se Indonesia, jadi bukan hanya Seluma, karena memang ini sudah kasus maka kami dari Bidang Aset mengatur satu persatu. Walaupun satu yang pending terus dilakukan, jika mau sekaligus tidak bisa, tentunya kami tidak diam terus bergerak penataan," jelasnya.

Data dari UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah (PPD) Seluma menyampaikan rincian tunggahan pejak kendaraan dinas Pembak Seluma. Untuk kendaraan roda dua ada 675 unit dengan tunggahan pejak belum terbayar Rp 302 juta. Sedangkan kendaraan roda empat 100 unit tunggahan pejak Rp 940 juta. Bila ditotal nilai tunggahan pejak sebesar Rp 1,2 miliar. Dunggahan tersebut sebagian besar merupakan aset yang sudah lama namun tidak lakukan penghapusan sehingga selalu muncul dalam daftar tung-

gak pejak kendaraan dinas. Data dari UPTD pengelolaan pendapatan daerah (PPD) Seluma menunjukkan kendaraan roda pejak kendaraan dinas Pembak Seluma, pejak untuk kendaraan roda dua ada 675 unit dengan total tunggahan belum terbayar Rp 302 juta, sedangkan kendaraan roda empat 100 unit dengan total tunggahan pejak 940 juta dengan total nilai pejak sebesar Rp 1,2 miliar.

"Kita sudah ngobrol dengan pihak Sumsud terkait dengan kendaraan yang sudah rusak berat dan tidak digunakan lagi. Kalau pejak semakin menumpuk sementara kendaraan tidak digunakan lagi, apakah nanti ada kebijakan dari Sumsud," harusnya.

Sementara itu, Inspektur Kabupaten Seluma melalui Kepala Tim Nelayan Aset Gum Berang mengatakan, berdasarkan data terakhir dari BPK aset kendaraan tahap awal tunggahan aset-aset yang data tidak jalan, keberatan di setiap OPD, itu data selanjut dilakukan. Saat ini sudah tahap penataan aset dilakukan penarikan aset kendaraan untuk dikumpulkan menjadi satu.

"Saat ini penarikan sudah mulai dilakukan, sebanyak 22 unit mobil sudah terkumpul. Setelah selanjutnya dikumpulkan maka selanjutnya kebijakan harusnya terdapat dengan apakah diperbaiki atau dikandangkan. Untuk yang rusak bisa beres tetap beroperasi," ujarnya.

Is mengatakan, tim masih terus berjalan untuk melakukan penarikan ini. Termasuk kendaraan beroda di desa-desa kadernanya dan parkirannya. Tidak ada hasil dihidari, semuanya harus diangkut ke BPKD, seperti mobil dan kendaraan rusak berat. "Kemungkinan besar dihidari, tidak akan tidak bisa dihidari. Kita akan tetap dimasa pun saat Pembak Seluma," ujarnya.

M.Si mengatakan mobil dinas (Mobnas) yang digunakan dinas aset tersebut sebagai pimpinan DPRD telah dikembalikan ke Sekretaris DPRD. Sehingga bukan lagi tanggung jawab dirinya. Karena mobnas tersebut merupakan mobil jabatan yang digunakan dirinya saat tugas mengahiasi keceakaan.

Kemudian rapat terakhir saat rapat koordinasi ke Sekretaris Daerah dipertahankan akan dilakukan perbaikan dan setelahnya baru diulang. "Jadi tidak ada lagi urusan saya sebagai pemegang mobil ini. Karena sudah diinstruksikan Sekretaris DPRD. Sehingga tidak ada persoalan, kalau soal keceakaan siapa yang mau keceakaan, tapi kalau banyak mobil keceakaan kok mobil yang saya gunakan rusak berat" kata Oti.

Sementara itu, terkait kondisi Mobnas yang hilang, Is mengatakan bukan urusan dirinya karena dia sudah menyerahkan ke Sekretaris DPRD Seluma dalam kondisi lengkap rekapitulasi rusak akibat keceakaan. "Itu bukan urusan saya sendiri yang hilang, saya sudah menyerahkan dalam kondisi lengkap walaupun rusak. Jadi bukan urusan saya hilang, hilang juga di sekretariat bukan urusan saya lagi" ujarnya.

Is mengatakan, mobil tersebut merupakan mobil jabatan yang melewat sehingga merupakan tanggung jawab pemerintah. Untuk anggaran perbaikan dianggarkan di Sekretaris DPRD Seluma. "Intinya setiap mobil rusak diperbaiki, tanggung jawab jawab saya enak benar," ujarnya. (Jus)

lahu jenis Paciro Sports yang sempat hilang setelah Polres Seluma melakukan pengujian saat ini masih terbelah dalam kondisi rusak di Bengkulu Bumi Ayu, Kota Bengkulu. Sejumlah kendaraan hilang.

Inspektur Inspektur Kabupaten Seluma Dedy Handayani, SE, M.Si, MA menyampaikan, pihaknya telah menyerahkan OPD untuk diteliti ke rumah orang tua. Tapi ini tidak ada laporan tindak lanjut.

"Kita sudah sering tapi sampai saat ini tidak ada laporan apakah sudah tindak lanjut atau belum," kata Inspektur.

Salah satu yang menjadi catatan dalam LHP BPK, OPD terkait pengelolaan aset kendaraan, laporkan harus membuktikan fisik kendaraan seperti semula dan apa bila kondisi tersebut hilang harus dihidari. Dan selanjutnya itu, seperti kondisi yang keponang di rumah tidak ada lagi saat terpacik di samping Sekretaris DPRD.

Yang menjadi kecurigaan terkait pengelolaan aset yang dihidari seperti, tapi sudah kita serati agar diperbaiki uji Desdy. Is mengemukakan, saat tugas Sekretaris DPRD Seluma mengahiasi keceakaan mobil fatik kendaraan. Jika pun hilang, kewajiban sekretariat atau pengguna barang harus mengahiasi barang tersebut. "Intinya mereka harus membuktikan kepastian kendaraan tersebut dan kondisi seperti semula" ujarnya.

Is menjelaskan, jika pun hilang OPD pencatat atau penyebab hilang atau rusak apa penyebabnya, apakah dalam perjalanan atau kecelakaan di jalan. Jika kecelakaan maka yang dipertanyakan harus mengahiasi. Tapi jika kerusakan dalam kondisi dinas OPD yang menperbaiki, harusnya.

Sementara itu, Wakil Ketua

M.Si mengatakan mobil dinas (Mobnas) yang digunakan dinas aset tersebut sebagai pimpinan DPRD telah dikembalikan ke Sekretaris DPRD. Sehingga bukan lagi tanggung jawab dirinya. Karena mobnas tersebut merupakan mobil jabatan yang digunakan dirinya saat tugas mengahiasi keceakaan.